

KEADILAN IKLIM, **MASYARAKAT ADAT,** DAN INDUSTRI NIKEL



Halo, Sobat CWI! Minggu lalu, kalian nonton debat cawapres nggak, nih? Kalau iya, kalian ingat nggak sih dengan istilah ‘keadilan iklim’ yang sempat disinggung dalam debat tersebut?



Selain itu, kalian juga masih ingat nggak sih terkait isu masyarakat adat yang juga menjadi subtema dalam debat cawapres?



Ternyata, ada lho kaitannya antara keadilan iklim dan masyarakat adat... Yuk, simak #LembarFakta kali ini!

Keadilan iklim tuh apa sih?

Meskipun perubahan iklim adalah permasalahan global dan universal, dampak-dampak yang telah dan berpotensi ditimbulkannya tidak akan dialami secara merata oleh seluruh elemen masyarakat.



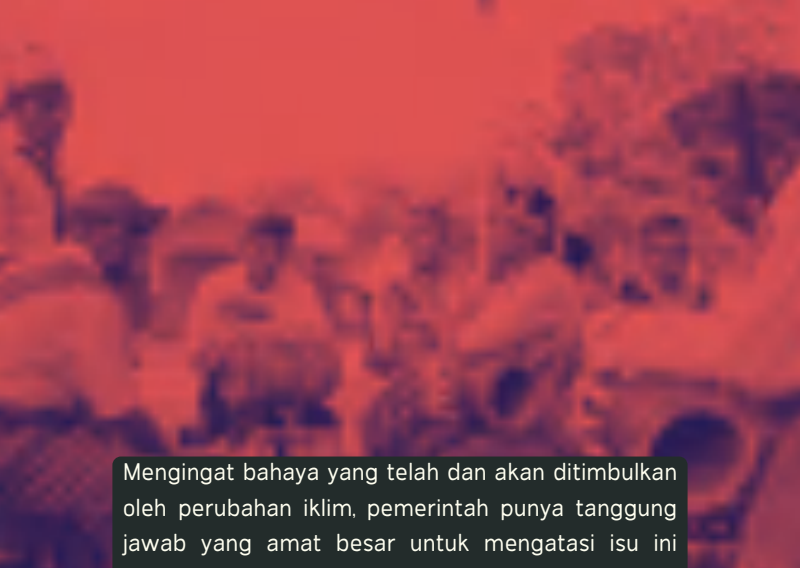
Nah, "keadilan iklim" itu bisa dipahami sebagai sebuah konsep yang menyadari dan mengakui kalau ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang terdampak secara lebih signifikan oleh perubahan iklim, yakni kelompok-kelompok rentan dan marjinal.

Keadilan Iklim dan Masyarakat Adat

Nah, salah satu kelompok yang rentan dan paling terdampak oleh perubahan iklim adalah *kelompok masyarakat adat*.

Masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam. Mereka sering kali tinggal di kawasan hutan dan sangat bergantung pada alam untuk menjalankan kehidupan mereka dengan berburu binatang dan meramu tanaman.

Oleh karena itu, nggak heran kan, kalau lingkungannya rusak karena bencana-bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, kehidupan masyarakat adat juga akan ikut terdampak.



Mengingat bahaya yang telah dan akan ditimbulkan oleh perubahan iklim, pemerintah punya tanggung jawab yang amat besar untuk mengatasi isu ini demi melindungi seluruh masyarakat, terkhusus kelompok-kelompok yang paling rentan seperti masyarakat adat tersebut.

Nah, tapi...

Industri Nikel: Jalan Keluar?

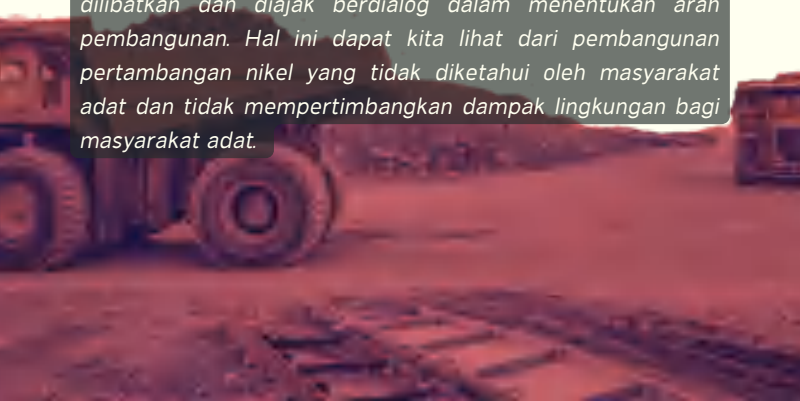
Salah satu strategi yang sekarang ini diutamakan oleh pemerintah Indonesia untuk bertransisi ke arah ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon adalah mendorong penggunaan 'kendaraan listrik'. Untuk itu, pemerintah juga saat ini mendorong pembangunan industri nikel yang berguna sebagai bahan baku untuk membuat baterai bagi kendaraan listrik.

Tapi, yang justru terjadi adalah pertambangan nikel yang berlebihan. Ditambah lagi, perusahaan dan pemerintah juga tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar yang terdampak, terkhusus masyarakat adat.

Kalau diingat-ingat dari Debat Cawapres minggu lalu, ketiga cawapres, sih, sepakat kalau keterlibatan masyarakat adat itu penting dalam proses pembangunan negara.

TAPI... EMANG GIMANA SIH KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN SELAMA INI DI INDONESIA???

Realitas menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak dilibatkan dan diajak berdialog dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan pertambangan nikel yang tidak diketahui oleh masyarakat adat dan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan bagi masyarakat adat.



Kasus Masyarakat Adat O'hangana Manyawa

Tambang nikel di wilayah adat mereka dibangun tanpa melibatkan masyarakat setempat. Pertambangan nikel ini mempersempit ruang hidup mereka dan membuat mereka rentan dikriminalisasi karena menentang pembangunan tambang nikel.



Padahal, selain mempersempit wilayah adat, pertambangan nikel ini juga mengakibatkan kerusakan hutan, mengambil alih lahan pertanian, mengurangi sumber air tawar, dan merusak sektor perikanan.

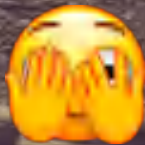
RUU-nya Mandek, Masyarakat Adat Semakin Terancam

RUU Masyarakat Adat merupakan payung hukum yang penting agar masyarakat adat mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-hak mereka. Namun, RUU Hukum Masyarakat Adat belum juga disahkan sejak tahun 2009.

Mandeknya pengesahan RUU Hukum Masyarakat Adat sendiri tidak terlepas dari kepentingan pembangunan, investasi, dan korporasi. Menurut Willy Aditya, Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Hukum Adat, ada "kekhawatiran" bahwa RUU Hukum Masyarakat Adat dapat menghambat pembangunan dan aktivitas bisnis, khususnya di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

**MAU MENGATASI PERUBAHAN IKLIM, TAPI CARA YANG
DIAMBIL NGGAK MEMIKIRKAN DULU DAMPAKNYA KE
LINGKUNGAN DAN MASYARAKATNYA GIMANA, HADUH!**

Nah, kalau begini, jadi negara itu berpihak pada kepentingan siapa sih, Sobat CWI? Masyarakat yang merupakan kelompok rentan dan marjinal atau malah korporasi?



REFERENSI

Azis, I. (2024, Januari 22). Apa Itu RUU Masyarakat Adat dan Kenapa Belum Disahkan? Tirto.id. Diakses melalui <https://tirto.id/apa-itu-ruu-masyarakat-adat-dan-kenapa-belum-disahkan-gUJ1>

Dewi, U. P. (2022, Agustus 09). Nasib Masyarakat Adat di Indonesia: Terabaikan, Termarginalisasi, Tidak Punya Perlindungan Hukum yang Jelas. The Conversation. Diakses Melalui <https://theconversation.com/nasib-masyarakat-adat-di-indonesia-terabaikan-termarginalisasi-tidak-punya-perlindungan-hukum-yang-jelas-187878>

Simmons, D. (2020). What is 'climate justice'?. Diakses melalui <https://yaleclimateconnections.org/2020/07/what-is-climate-justice/>

Utama, A. (2023, November 10). Masyarakat Adat O'hangana Manyawa di Halmahera Terjepit Industri Nikel, Citra Primitif, dan Dugaan Kriminalisasi. BBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgp0g6k8mvo>

Wardah, F. (2021, November 24). Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan? VOA Indonesia. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ruu-masyarakat-hukum-adat-tak-kunjung-disahkan-6324774.html>

DP, YA. (2024, Januari 22). Para Raksasa dalam Deforestasi dan Nasib Tanah Adat di Tambang Nikel. Bisnis.com. <https://ekonomibisnis.com/read/20240122/44/1734303/para-raksasa-dalam-deforestasi-dan-nasib-tanah-adat-di-tambang-nikel>